

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komprehensif yang digunakan untuk mencerminkan derajat kesehatan, capaian pendidikan, dan standar hidup layak sebagai cerminan kualitas sumber daya manusia. Penelitian empiris menunjukkan bahwa program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan berbagai bentuk bantuan pangan telah memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan IPM di berbagai wilayah, karena membantu memperbaiki akses layanan dasar dan kesejahteraan keluarga miskin. (Triski Anawati & Retno Febriyastuti Widyawati, 2025).

Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu daerah yang memperoleh dukungan berupa Dana Desa dan PKH dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mendorong percepatan pembangunan manusia. Dana Desa digunakan bagi pembangunan fisik desa serta pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti perbaikan infrastruktur, pengembangan usaha lokal, serta peningkatan layanan dasar. Di sisi lain, PKH berfungsi sebagai bantuan sosial resmi yang pengalokasiannya di sertakan untuk keluarga kurang mampu agar mereka mampu memenuhi kebutuhan esensial, khususnya terkait kesehatan dan pendidikan. Meski berbagai program tersebut telah berjalan, kajian lebih lanjut tetap diperlukan untuk menilai sejauh mana efektivitasnya dalam mendorong peningkatan IPM di Kabupaten Pamekasan.



**Gambar 1.1 Grafik pertumbuhan ipm di kabupaten pamekasan 2014-2023**

Menurut standar yang ditetapkan oleh UNDP, daerah dengan nilai IPM di bawah 51 dikategorikan sebagai wilayah dengan tingkat pembangunan manusia rendah. Sementara itu, IPM yang berada pada rentang 51 hingga 79 termasuk dalam kategori sedang, dan nilai IPM yang melebihi angka 79 diklasifikasikan sebagai tinggi. Berdasarkan ketentuan tersebut, capaian IPM Kabupaten Pamekasan berada pada kelompok IPM tinggi. Dengan nilai IPM Kabupaten Pamekasan sebesar 70,32 pada tahun 2023, maka IPM Kabupaten Pamekasan berada pada tingkat tinggi apabila dibandingkan dengan Kabupaten lain di pulau Madura, Pamekasan menjadi satu-satunya Kabupaten dengan status IPM tinggi, sedangkan Kabupaten Bangkalan, Sampang dan Sumenep masih berada pada kategori sedang.

IPM mencerminkan hasil pembangunan manusia dari sisi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak serta menindaklanjuti pentingnya indikator ini, penelitian empiris terbaru menyatakan bahwa belanja pemerintah yang diarahkan pada sektor sosial dan kesehatan memiliki kontribusi signifikan terhadap peningkatan IPM di Indonesia (Tamara & Yeniwati, 2024).

Salah satu kondimen penting dalam IPM merupakan angka harapan hidup, yang sering dijadikan indikator kualitas suatu wilayah. Angka harapan hidup mencerminkan kondisi kebutuhan jasmani masyarakat dan mencatat sejauh mana layanan kesehatan, lingkungan, serta kesejahteraan penduduk dapat mendukung umur panjang. Dilihat dari hasil analisis dan regresi yang umum dilakukan dalam penelitian pembangunan, indikator ini dapat menunjukkan apakah sebuah desa telah memenuhi standar kualitas yang dibutuhkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan penduduknya. Dengan adanya perbaikan kualitas layanan dasar yang terus ditingkatkan, diharapkan masyarakat desa mampu berkembang dan mencapai kehidupan yang lebih baik kedepannya.

Pemerataan ekonomi pada beberapa kondisi dilakukan untuk menciptakan peluang hidup yang lebih baik serta mendorong kesejahteraan di suatu daerah atau kota. Upaya tersebut kerap menjadi pedoman bagi para pemimpin wilayah untuk diterapkan dalam lingkup pemerintahan mereka, sebagai langkah meningkatkan kualitas. Alokasi Dana Desa sendiri dirancang untuk menunjang pelaksanaan otonomi desa serta memperkuat kapasitas pemerintah desa serta masyarakat.

Pengeluaran pemerintah dalam bentuk belanja operasional dan belanja modal memiliki efek langsung dan tidak langsung terhadap pembangunan manusia (IPM) di wilayah tertinggal melalui peran ekonomi regional sebagai variabel intervening. Hal ini menegaskan bahwa kebijakan fiskal dan alokasi belanja publik merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah dengan pembangunan rendah (Suyanto,2025)

Dalam rentang tahun 2014 hingga 2023, kondisi kemiskinan di Kabupaten Pamekasan baik pada tingkat kabupaten maupun di 13 kecamatan yang berada di bawah administrasinya mengalami perubahan yang cukup berarti. Walaupun data angka kemiskinan secara detail hingga level kecamatan dan desa tidak tersedia secara luas, gambaran mengenai situasi tersebut tetap dapat disusun melalui analisis perkembangan tren di tingkat kabupaten. Selain itu, pendekatan yang mempertimbangkan aspek geografis, ekonomi, serta sosial budaya di setiap wilayah turut membantu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika kemiskinan di daerah tersebut (*Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, 2025*).

Berdasarkan catatan, Daerah Pamekasan mengalami lonjakan angka kemiskinan sejak 2019 hingga mencapai puncaknya pada tahun 2021, yaitu sebesar 15,30%. Lonjakan ini erat kaitannya dengan dampak COVID-19 yang menimbulkan tekanan berat bukan hanya pada sistem kesehatan, tetapi juga terhadap stabilitas ekonomi masyarakat. Banyak pelaku usaha skala kecil, petani, serta tenaga kerja informal yang kehilangan sumber nafkah, sehingga menyebabkan peningkatan jumlah rumah tangga yang tergolong miskin. Kabupaten Pamekasan, yang masyarakatnya sebagian besar bergantung pada sektor pertanian dan perdagangan skala kecil, turut merasakan dampak besar dari krisis ini.

Beberapa desa seperti Blumbungan, Bungbaruh, dan Kadur yang memiliki jumlah penduduk cukup padat namun kurang memadai dalam hal infrastruktur ekonomi kemungkinan menjadi daerah dengan tingkat kerentanan yang tinggi terhadap kemiskinan. Sementara desa yang letaknya lebih dekat dengan pusat kegiatan ekonomi atau jalur transportasi, seperti Desa Larangan Tokol dan

Larangan Badung, menunjukkan ketahanan ekonomi yang sedikit lebih baik, meski tetap terdampak.

Memasuki periode pasca-2021, kondisi kemiskinan secara bertahap mulai membaik, seiring dengan pemulihan aktivitas ekonomi serta penerapan kebijakan strategis oleh pemerintah daerah. melalui program sosial seperti Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) serta Program Keluarga Harapan (PKH) juga memainkan peranan penting dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah inflasi harga kebutuhan pokok.

Meski demikian, sejumlah permasalahan struktural masih menjadi tantangan dalam upaya mengurangi kemiskinan secara menyeluruh di wilayah ini. Mayoritas warga masih bekerja di sektor informal yang tidak memiliki perlindungan sosial, dan produktivitas pertanian masih tergolong rendah akibat keterbatasan fasilitas seperti sistem irigasi, akses pupuk, serta teknologi pertanian yang memadai. Akses masyarakat terhadap pendidikan yang bermutu serta layanan kesehatan yang memadai masih belum seimbang di berbagai wilayah, sehingga menimbulkan hambatan dalam mobilitas sosial, terutama bagi generasi muda yang kesulitan menembus sektor kerja formal di luar pertanian dan perdagangan kecil.

Penurunan angka kemiskinan menjadi 13,41% pada tahun 2024 tentu merupakan perkembangan positif yang layak di apresiasi. Namun, angka tersebut masih menunjukkan bahwa sekitar satu dari 7 warga hidup di bawah garis

kemiskinan. Di Kabupaten Pamekasan dan desa-desa di dalamnya, terlihat dari kondisi seperti rumah tidak layak huni, keterbatasan akses sanitasi, dan penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan dasar. Maka dibutuhkan pendekatan pembangunan yang lebih inklusif dan berbasis potensi lokal, dengan fokus pada pengembangan kapasitas sumber daya manusia di desa, pemberdayaan perempuan, serta penyediaan akses permodalan yang lebih inklusif.

Pada akhirnya, persoalan kemiskinan di Kabupaten Pamekasan selama lima tahun terakhir bukan semata soal statistik, melainkan juga merupakan hasil dari interaksi kompleks antara kebijakan publik, kondisi ekonomi, dan struktur sosial masyarakat. Upaya pemberantasan kemiskinan yang berkelanjutan harus mengedepankan strategi yang tidak hanya akurat secara data, tetapi juga mampu melibatkan masyarakat lokal dalam proses perencanaan dan pelaksanaan solusi.



Sumber : (*Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, 2025*)

Pemanfaatan dana desa diharapkan mampu mendorong percepatan pembangunan di tingkat lokal, sebab pemerintah desa memperoleh anggaran yang

dapat dijadikan sebagai modal untuk merealisasikan berbagai program pembangunan. Kabupaten Pamekasan sendiri memiliki sejumlah kecamatan dan desa yang berada pada wilayah strategis serta didukung oleh beragam sumber daya alam yang melimpah, di mana mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Pengalokasian dana desa dimulai sejak tahun 2015 (Erfinanto, 2023).

kemajuan suatu wilayah tidak dapat dilepaskan dari peran aktif pemerintah dalam mengalokasikan belanja publik yang berpihak pada sektor sosial, khususnya pendidikan dan kesehatan. Kebijakan tersebut berperan sebagai instrumen redistribusi yang mampu memperkecil kesenjangan kesejahteraan antarwilayah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama pada kelompok berpendapatan rendah (Lantion,(2024)

Melalui program ini, masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh kemudahan untuk melanjutkan pendidikan anak hingga jenjang SD, SMP, bahkan SMA, sekaligus membantu keluarga memenuhi kebutuhan dasar mereka. Pendidikan menjadi salah satu faktor kunci dalam memutus rantai kemiskinan, khususnya di pedesaan, di mana masih banyak masyarakat yang terhenti sekolah karena kendala ekonomi. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat desa berpotensi meningkatkan angka pengangguran, yang pada akhirnya memperburuk kondisi kemiskinan serta memperlebar ketimpangan sosial di wilayah tersebut (Latane & Dkk, 2023).

Temuan dari penelitian yang sedang dikaji ini mampu merealisasikan pandangan masyarakat yang lebih dalam mengenai efektivitas ketiga kebijakan tersebut serta menghasilkan rekomendasi yang dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Najidah & Lestari, 2017).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, maka masalah yang ingin ditelusuri dari penelitian ini diselaraskan sebagai berikut:

1. Sejauh mana Dana Desa memiliki dampak terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana keterkaitan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan progres kenaikan IPM di Kabupaten Pamekasan?
3. Bagaimana hasil realisasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap peningkatan IPM di Kabupaten Pamekasan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan utama yang apa saja dicapai melalui penelitian ini adalah :

1. Mengkaji keterkaitan Dana Desa bagi peningkatan IPM di Kabupaten Pamekasan.
2. Menganalisis keterkaitan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan peningkatan IPM di Kabupaten Pamekasan.
3. Menilai pengaruh Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap peningkatan IPM Kabupaten Pamekasan.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan agar dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan hasil lebih dari sebelumnya bagi pengembangan kajian akademik yang berkaitan untuk kebijakan sosial dan pembangunan manusia.
- b. Menjadi rujukan bagi studi-studi selanjutnya yang ingin menilai efektivitas program pemerintah dalam meningkatkan IPM.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Menyediakan masukan berupa rekomendasi untuk pemerintah daerah dalam merealisasikan kebijakan yang lebih efektif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- b. Membantu masyarakat memahami sejauh mana program Dana Desa, PKH, dan BLT berkontribusi terhadap perbaikan kualitas hidup dan pembangunan manusia.